

**BAB III**  
**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI KOTA PADANG**  
**SERTA SEJARAH MUHAMMADIYAH, PERTI DAN NU**

**1. Keterlibatan Perempuan Dalam Politik di Kota Padang**

**1.1. Kondisi Politik Perempuan di Kota Padang**

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (*power*) dan pengambilan keputusan. Lingkupnya dimulai dari institusi keluarga hingga institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu pengertian politik pada prinsipnya meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki (Faizal, 2016: 95).

Secara historis Minangkabau, sistem kekerabatan matrilineal secara tidak langsung telah menunjukkan adanya kekuasaan yang dipegang oleh perempuan dalam pemegang hak waris, meskipun laki-laki yang turut serta dalam pengaturannya. Namun pada bagian-bagian tertentu, dulu perempuan tetap dibatasi kegiatannya, misalnya dalam hal untuk mendapatkan pendidikan. Periode sebelum tahun 1870 pendidikan di Minangkabau hampir sepenuhnya ikhtiar orang pribumi. Sesudah itu makin lama makin menjadi produk zaman yang menjalar ke seluruh negeri Hindia Belanda. Politik etis yang awalnya hanya politik balas budi, keprihatinan atas kebijakan kesejahteraan bangsa Indonesia yang sebelumnya dieksploitatif, telah melahirkan sebuah generasi yang menggapai pembangunan melalui institusi pendidikan modern dan mengenal perubahan termasuk pemuda-pemudinya.

Ini menjadikan periode yang penting bagi masyarakat Minangkabau, terutama kaum perempuan di Kota Padang. Pada saat itu terjadi sebuah peristiwa bersejarah bagi kehidupan masyarakat dan perempuan Minangkabau ketika Belanda menerapkan politik etis. Kesempatan ini

menjadi penting bagi kaum perempuan dalam melakukan pembaharuan terhadap sistem nilai yang selama ini membatasi mereka. Rohana Kudus memulai pergerakan perempuan dan diikuti oleh beberapa tokoh perempuan lainnya membuktikan hal itu, bahwa mereka mampu melaksanakan peran yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Kaum perempuan Minangkabau, khususnya sejak awal abad dua puluh, dikenal sebagai kaum yang aktif dalam dunia pendidikan serta politik, dua ranah yang dianggap menjadi ranah laki-laki pada masa itu.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumbar yang juga ikut dalam pemilu 2014. Secara konstitusi tentunya hak semua perempuan Indonesia tak terkecuali siapapun dia, dari latar belakang apapun berhak mendaftarkan diri menjadi caleg. Begitupun perempuan di kota Padang juga berhak mendapatkan hak berpolitik salah satunya dengan cara menjadi kader dan caleg yang akan diusung oleh 15 parpol yang lulus verifikasi pemilu dan seleksi untuk mengikuti pemilu 2014 seperti data KPU Sumbar ([www.kpu-sumbarprov.go.id](http://www.kpu-sumbarprov.go.id) diakses 5 Februari 2018). Adapun daftar keterlibatan perempuan dalam tiap partai dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 1.3**  
**Keterlibatan Perempuan dalam Politik**  
**di Kota Padang Tahun 2009**

No	Parpol	Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3		Dapil 4		Dapil 5		Jumlah	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Nasdem	8	3	7	3	7	3	6	3	8	3	36	15
2	PKB	8	3	7	3	7	3	6	3	8	3	36	15
3	PKS	8	3	7	3	8	3	6	3	6	3	35	15
4	PDIP	8	3	5	3	6	4	6	3	8	3	33	16
5	Golkar	8	3	6	3	8	3	6	3	5	3	33	15
6	Gerindra	8	3	7	3	7	3	6	3	6	3	34	15
7	Demokrat	8	3	7	3	7	3	6	3	5	4	33	16
8	PAN	8	3	7	3	8	3	6	3	7	3	36	15
9	PPP	8	3	7	3	7	3	6	3	5	3	33	15
10	Hanura	8	3	7	3	8	3	6	3	6	3	35	15
11	PBB	8	3	6	3	6	4	7	3	6	3	33	16

12	PKPI	8	3	0	0	7	3	7	3	6	3	28	12
<b>Jumlah</b>											<b>405</b>	<b>180</b>	

Sumber Data: www.KPU Sumbar Tahun 2009  
diakses pada tanggal 14 Maret 2018

**Tabel 1.4**  
**Keterlibatan Perempuan dalam Politik**  
**di Kota Padang Tahun 2014**

No	Parpol	Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3		Dapil 4		Dapil 5		Jumlah	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Nasdem	6	3	6	3	7	3	5	3	6	3	30	15
2	PKB	6	3	6	3	7	3	5	3	6	3	30	15
3	PKS	6	3	6	3	7	3	5	3	6	3	30	15
4	PDIP	6	3	5	3	6	4	5	3	6	3	28	16
5	Golkar	6	3	6	3	7	3	5	3	5	3	29	15
6	Gerindra	6	3	6	3	7	3	5	3	6	3	30	15
7	Demokrat	6	3	6	3	7	3	5	3	5	4	29	16
8	PAN	6	3	6	3	7	3	5	3	6	3	30	15
9	PPP	6	3	6	3	7	3	5	3	5	3	29	15
10	Hanura	6	3	6	3	7	3	5	3	6	3	30	15
11	PBB	6	3	6	3	6	4	5	3	6	3	29	16
12	PKPI	6	3	0	0	7	3	5	3	6	3	24	12
<b>Jumlah</b>											<b>348</b>	<b>180</b>	

Sumber Data: www.KPU Sumbar Tahun 2009  
diakses pada tanggal 14 Maret 2018

Dari data KPU Sumbar di atas dapat terlihat data jumlah caleg perempuan di Kota Padang masih sangat minim dibandingkan dengan caleg laki-laki, namun dengan munculnya banyak perempuan sebagai caleg tentunya membawa angin segar pada aspirasi politik kaum perempuan. Permasalahannya adalah pegakuan secara sosial kultural terhadap caleg-caleg perempuan yang mengajukan diri dalam pemilu. Pengakuan secara sosial kultural itu jauh lebih penting dari pada pengakuan legitimasi secara hukum dan tertulis, karena menyangkut kepercayaan masyarakat umum untuk memilih seorang perempuan menjadi wakil mereka di panggung politik.

Hal ini juga di perkuat oleh paham-paham gender yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat

Sumatera Barat pada khususnya. Adanya keyakinan yang telah tertanam kuat dan mengakar dalam masyarakat kota Padang yang mayoritasnya adalah orang Minangkabau bahwa pemimpin itu sebaiknya kaum laki-laki, bahkan dengan semboyan *jika masih ada laki-laki sebagai calon pemimpin mengapa harus memilih yang perempuan*. Cara berpikir seperti ini adalah efek dari paham gender dan penilaian secara subjektif terhadap kemampuan perempuan dalam bidang politi. Hal ini tanpa disadari telah membuat kaum perempuan terdiskriminasi secara sosial di panggung politik. Seakan-akan perempuan masuk panggung politik di kota Padang hanya untuk meramaikan pesta demokrasi semata.

Mereka sebagai pelengkap daftar urut caleg, hanya untuk mempercantik nama parpol karena telah mengusung nama perempuan dan untuk lulus syarat yang ditetapkan KPU dengan mengusung caleg perempuan 30 % dari quota. Lebih parahnya lagi jika perempuan mendaftarkan diri sebagai caleg mereka seakan-akan sudah benar-benar harus siap kalah dan kehilangan semua yang telah dikorbankan selama proses pemilihan hal ini juga diperparah dengan *Stereotype*, Kenyataannya ialah bahwa setiap kehidupan wanita itu mencakup pekerjaan, keluwesan dan kebutuhan adanya kerjasama, dalam hal ini lebih dahulu kita akan mengamati peran-peran umum yang berlawanan, yaitu wanita rumah tangga dan wanita karier tidak terkecuali berkarier di panggung politik. Jika hal ini benar maka kecil sekali kemungkinan para perempuan bisa berkiprah di panggung politik dengan jumlah yang bisa bersaing dengan jumlah caleg laki-laki yang selama ini telah didominasi oleh para laki-laki akibat konstruksi sosiokultural (gender) terutama di kota Padang antara masyarakat dengan politik sendiri memiliki hubungan timbal balik.

Ada banyak faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di Kota Padang. Antara lain, proses nominasi parpol yang tidak adil dan cenderung tidak ramah perempuan. Nominasi calon anggota parlemen biasanya dilakukan melalui keputusan tertutup atau tidak transparan. Dari 3

kali Pemilu (2004, 2009 dan 2014), belum berhasil mengubah, memberdayakan dan membebaskan perempuan. Partisipasi kaum ibu ini di arena politik belum menjadi subjek yang otonom. Tetapi tetap menjadi kelompok yang marginal berlapis secara kultur, etnis, gender dan politik. Padahal keterlibatan politik perempuan ini sangat penting, karena parlemen adalah institusi utama untuk keterwakilan masyarakat dalam negara demokratis.

### 1.2. Daftar Perempuan yang Masih Aktif dalam Politik di Kota Padang

Berdasarkan data statistik jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki harusnya anggota Legislatif lebih banyak dari kaum perempuan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, laki-laki lebih banyak dalam lingkaran politik dan kekuasaan. Setidaknya minimal 30 persen seperti yang diamanatkan Undang-Undang, anggota legislatif adalah perempuan. Namun belum ada kuota tersebut terpenuhi (Amril Amin, wawancara awal 2017). Salah satu contoh keterwakilan perempuan dari berbagai partai dapat dikatakan belum memenuhi kuota dari 53 caleg yang tersebar di lima daerah pemilihan di kota Padang pada hasil pemilu 2014. Seperti dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1.5**  
**Gambaran Keterwakilan Perempuan untuk DPRD**  
**Kota Padang pada Periode 2014-2019**

No	Daerah Pemilihan	Nama	Partai
1	Dapil I (Koto Tangah)	a. Mailinda Rose b. Gustin Pramona c. Yuhilda Darwis	NASDEM DEMOKRAT PPP
2	Dapil II (Kuranji dan Pauh)	Dian Anggraini	NASDEM
3	Dapil III (Lubeg, Lubuk Kilangan dan Bungtekab)	a. Elly Trisyanti b. Dewi Susanti c. Nila Kartika	GERINDRA GERINDRA PPP

Sumber Data: KPU Kota Padang Tahun 2014

Lebih lanjut mengenal anggota perempuan DPRD Kota Padang pada periode 2014-2019 yang pertama Mailinda Rose adalah seorang wiraswasta, di mana pada pemilihan periode 2014-2019 Mailinda Rose bergabung dengan partai Nasdem dan merupakan calon dari dapil III (tiga) partai Nasdem mendapatkan suara sebanyak 5,927 dan Mailinda Rose mendapatkan suara sebanyak 1,807 suara. Sekarang Mailinda Rose menjadi ketua fraksi dari partai Nasdem dan Mailinda Rose juga berada di Komisi IV sebagai anggota (Halomoan, 2015:10).

Kedua Gustin Pramona yang dimana dia merupakan seorang politisi dari partai Demokrat, dan merupakan sarjana perternakan Universitas Andalas. Pada periode sebelumnya Gustin Pramona juga terpilih sebagai anggota DPRD Kota Padang. Pada periode sekarang Gustin Pramona menjadi wakil dari dapil 1 (satu) pada pemilihan pada tahun 2014 yang lalu, partai Demokrat mendapatkan suara sebanyak 7,336, dan suara untuk caleg Gustin Pramona dengan perolehan suara pribadi sebanyak 1,391 (Halomoan, 2015:10).

Ketiga Yuhilda Darwis adalah seorang pengusaha dan politisi yang telah berkecimpung di dunia politik, dimana pada periode 2009-2014 Yuhilda Darwis merupakan anggota legislatif Kota Lampung. Yuhilda Darwis juga aktif bergabung di organisasi perempuan berbasis kemasyarakatan di Bengkulu yaitu, Ikatan Wanita Pengusaha Bengkulu (IWPB). Yuhilda Darwis juga merupakan serjana ekonomi Universitas Andalas. Pada tahun 2014 Yuhilda Darwis memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Kota Padang yang merupakan kampung halaman dari Yuhilda Darwis. Pada periode 2014-2019 di DPRD Kota Padang Yuhilda Darwis diusung partai PPP dari dapil I dan sekarang menjabat sebagai anggota dari fraksi PPP dan sebagai ketua dari komisi I (Halomoan, 2015:12).

Keempat Dian Angraini merupakan 1 (satu) dari 5 (lima) anggota perempuan DPRD Kota Padang yang memiliki gelar magister. Sebelumnya Dian Angraini merupakan dosen pengajar dari UIN Imam Bonjol Padang. Dian

Angraini sebelumnya merupakan salah seorang anggota baru dari partai Nasdem. Di partai Nasdem ia menjabat sebagai bendahara partai Nasdem. Pada pemilihan legislatif 2014 ia menjadi caleg partai Nasdem dari Dapil II, dengan memperoleh nomor urut 2. Ia berhasil lolos ke DPRD Kota Padang setelah mengalahkan rekan se-partainya dengan total perolehan suara sebesar 1.101 suara (Halomoan, 2015:10).

Kelima Elly Thrisyanti adalah seorang Sarjana lulusan Universitas Andalas jurusan ekonomi dan Elly Trisyanti merupakan seorang pekerja swasta sebelum mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Kota Padang. Elly Thrisyanti juga merupakan istri dari wakil ketua partai Gerindra Kota Padang.<sup>14</sup> Pada pemilihan legislatif pada tahun 2014 Elly Trisyanti merupakan calon dari dapil II diusung partai Gerindra, dia memperoleh nomor urut 1 dari dapilnya. Sekarang menjabat sebagai ketua fraksi partai Gerindra dan sebagai anggota dari komisi IV (Halomoan, 2015:12).

Keenam Dewi Susanti dimana Dewi Susanti merupakan satu-satunya calon anggota legislatif Kota Padang yang hanya lulusan sekolah Menengah Atas, beliau seorang wiraswasta di bidang kosmetik dan bukan berasal dari tokoh politik yang dikenal oleh masyarakat dan baru pertama kali mencalonkan diri dalam pemilu legislatif di Kota Padang pada tahun 2014. Ia bergabung dengan partai Gerindra karena memiliki ketertarikan dengan partai Gerindra. Pada saat pemilu Dewi Susanti diletakkan pada nomor urut yang tidak diunggulkan, yaitu dari sepuluh orang caleg partai Gerindra yang bersaing pada pemilihan 2014, beliau di tempatkan pada urutan kesembilan. Pada pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 Dewi Susanti bergabung dengan partai Gerindra dan terpilih sebagai anggota DPRD Kota Padang (Halomoan, 2015:11).

Ketujuh Nila Kartika yang merupakan wiraswasta, dimana pada pemilihan anggota DPRD Kota Padang pada tahun 2014 Nila Kartika merupakan calon dari dapil III diusung oleh partai PPP, sekarang menjabat

sebagai anggota dari fraksi PPP dan sebagai anggota dari komisi III (Halomoan, 2015:103).

### **1.3. Kondisi Sosial Budaya dan Agama**

#### **a. Sosial budaya**

Mayoritas penduduk Kota Padang merupakan suku Minangkabau. Suku ini awalnya berasal dari dua klan utama Koto Piliang didirikan Datuak Katumanggungan dan Bodi Chaniago yang didirikan Datuak Parpatiah nan Sabatang, Suka Kato Piliang memakai sistem aristokrasi yang dikenal dengan istilah Titiak Dari Ateh (titik dari atas) ala Istana Pagaruyung, sedangkan Bodi Chaniago lebih bersifat demokratis, yang dikenal dengan istilah Mambasuik Dari Bumi (muncul dari bumi) (<https://stamalia.wordpress.com>, Kota Padang dan Kebudayaannya, diakses pada tanggal 34 April 2017).

Masyarakat Kota Padang, sangat menghargai nilai-nilai adat dan budaya tradisional serta terbuka terhadap nilai-nilai positif yang datang dari luar. Kondisi ini membawa kepada komunitas yang sangat kondusif bagi pembangunan nasional dan cita-cita reformasi. Meskipun suku Minangkabau mendominasi masyarakat Kota Padang secara keseluruhan, kehidupan mereka relatif rukun dan damai dengan warga pendatang lainnya yang terdiri atas berbagai etnis minoritas, seperti Suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, suku Mandailing, transmigran asal Jawa dikelompok etnis Cina, dan berbagai suku pendatang lainnya yang berdiam di Kota Padang. Di antara sesama mereka terdapat hubungan dan interaksi sosial yang positif dan jarang terdapat jurang dan kecemburuan sosial yang besar antara berbagai kelompok dan golongan (<https://stamalia.wordpress.com>, Kota Padang dan Kebudayaannya, diakses pada tanggal 34 April 2017).

#### **b. Agama**

Mayoritas penduduk masyarakat Kota Padang beragama Islam. Selain itu ada juga yang beragama Kristen di Kepulauan Mentawai, serta Hindu dan Buddha yang pada umumnya adalah para pendatang. Berdasarkan hasil data statistik Kota Padang pada tahun 2016 penduduk yang memeluk Agama



Islam (777.053), Protestan (6.740), Katolik (11.292), Hindu (1.117), Buddha (5.142) (Badan Statistik Kota Padang 2016). Aliran keagamaan yang berkembang di kota Padang cukup beragam, ada aliran yang menganut paham tradisional dan ada juga yang menganut paham modern. Di antara aliran tradisional yang berkembang di kecamatan ini adalah aliran tarbiyah dan tarikat. Salah satu ajaran dari tarikat ini yang paling menonjol adalah dalam penyampaian khutbah Jumat masih menggunakan bahasa Arab.

Oleh karena itu sosial budaya masyarakat di Kota Padang ini diwarnai oleh paham aliran keagamaan yang berkembang di tempat tersebut. Para penganut aliran tarekat biasanya berusaha melestarikan tradisi-tradisi yang mereka anut, demikian juga dengan tarbiyah dan Muhammadiyah. Bahkan dalam pelaksanaan ibadah pun masing-masing aliran ini memiliki ciri khas tersendiri yang berusaha dilestarikan oleh masing-masing pengikutnya.

## **2. Sejarah Muhammadiyah, Perti dan NU**

### **2.1. Sejarah berdirinya Muhammadiyah**

Salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Dahlan yang semasa kecilnya bernama Muhammad Darwis dilahirkan pada tahun 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya adalah K.H. Abubakar bin Haji Sulaiman, seorang khatib pada masjid Sultan Yogyakarta.<sup>5</sup> Sebagai seorang anak dari keluarga yang taat beragama, tentu saja Dahlan sejak kanak-kanak telah menggeluti pendidikan agama seperti Alquran, hadis, fikih, tafsir, nahu, saraf di berbagai lembaga pendidikan agama di sekitar Yogyakarta.

Melihat pesatnya perkembangan Muhammadiyah di Pekalongan, Haji Rasul timbul keinginannya untuk mendirikan Muhammadiyah di Minangkabau. Sepulangnya Haji Rasul ke kampung halamannya nagari Sungai Batang Tanjung Sani, Maninjau, ia dibantu Marah Intan, Datuk Majolelo dan Sutan Marajo, mulai mengadakan musyawarah dengan pemuka masyarakat Nagari Sungai Batang. Pada tanggal 29 Mei 1925 diambil

keputusan untuk mendirikan Cabang Muhammadiyah di Nagari Sungai Batang-Tanjung Sani. Sebelumnya pun di tempat ini sudah berdiri suatu perkumpulan yang bernama Sendi Aman Tiang Selamat yang didirikan Haji Rasul, dan Haji Rasul meminta mengganti namanya dengan Muhammadiyah dan meminta pengakuan sebagai bagian cabang Yogyakarta (Asmara, 2016:47).

Tokoh lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Barat adalah Buya Tuo, yang mempunyai nama lengkap Ahmad Rasjid yang bergelar Sutan Mansyur asal Sungai Batang, Maninjau. Hampir seluruh hidupnya disumbangkan untuk Muhammadiyah. Berasama beberapa orang temannya Saalah Yusuf Sutan Mangkuto, Datuk Sati dan lain-lain, yang pulang dari Jawa, membawa mandat dari Pengurus Besar Muhammadiyah untuk mendirikan Cabang di Padang panjang. Kota ini menjadi konsulat Muhammadiyah daerah Sumatera Barat, dengan besluit H. B. nomor 36 tertanggal 20 juli 1927.

Kemudian setelah organisasi ini dirasa mulai mantap, konsolidasi dan musyawarah untuk meningkatkan amal dan perjuangan selalu diadakan. Seminggu setelah didirikannya cabang Padang Panjang didirikan pula cabang-cabang Muhammadiyah lainnya seperti Simambur, Batusangkar (27 Juli 1927), Bukitinggi (20 Juli 1928), Kuraitaji, Pariaman (25 Oktober 1929), dan Kubang, Payakumbuh (25 Desember 1929) serta di Padang tahun 1930. Dalam bidang politik Muhammadiyah Kota Padang berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsionil, secara operasionil dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridldai Allah SWT.

Di dalam khittah yang dikukuhkan pada Mukatamar ke-38 tahun 1971 tersebut, menegaskan sikap politik Muhammadiyah bahwa organisasi Muhammadiyah tidak memiliki hubungan dengan partai politik atau organisasi apapun, tetapi bagi warga Muhammadiyah yang terjun ke politik praktis diberikan kebebasan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah. Khittah perjuangan tersebut merupakan landasan utama yang digunakan Muhammadiyah dalam hal berpolitik. Khittah tersebut bertujuan untuk membebaskan Muhammadiyah dari tarik menarik kepentingan politik sehingga dikhawatirkan dapat membelokkan arah gerakan Muhammadiyah (Nashir, 2000: 7).

Gerakan Muhammadiyah berdasarkan kriteria tersebut digolongkan kedalam gerakan sosial karena karakteristik pergerakan Muhammadiyah lebih menyentuh kepada masyarakat belum bertujuan untuk meraih kekuasaan, namun dalam tubuh Muhammadiyah muncul variasi-variasi kelompok politik yang saling berbeda, perbedaan ini timbul akibat benturan pemikiran kelompok-kelompok yang dikenal dengan *old generation* dan *young generation*. Penegasan ini lebih lanjut di tuangkan dalam konsep Khittah Perjuangan Muhammadiyah, gerakan dalam bidang sosial atau masyarakat adalah berjuang untuk mengolah dan menggarap masyarakat secara langsung melalui organisasi non partai, sedangkan bidang politik berjuang untuk memegang kekuasaan pemerintahan melalui partai politik, dan Muhammadiyah memilih bidang kemasyarakatan atau sosial (Nashir, 2000: 91).

Sedangkan dalam kategori gerakan Islam, Muhammadiyah lebih dipandang sebagai berparadigma modernis karena Muhammadiyah lebih terbuka terhadap ide-ide modernisme, ide-ide modernisme tersebut diolah sesuai dengan kultur keagamaan dan konsep Islam sehingga bisa diterapkan untuk kemajuan masyarakat. Hal tersebut telah dilakukan oleh Muhammadiyah mulai dari awal berdirinya hingga era globalisasi sengan

menyerap pemikiran modernisme islam, demokrasi, isu-isu *civil society*, HAM, sistem pendidikan dan ide-ide global lainnya.

### **3.1.1 Sejarah Berdirinya Perti**

Sejak Islam masuk ke Minangkabau, telah terjadi beberapa kali pembaharuan. Pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau yang dipelopori oleh kaum muda. Gerakan itu bertujuan untuk mengubah tradisi, terutama gerakan tarekat. Kaum muda melakukan perubahan melalui pendidikan, dakwah, media cetak dan perdebatan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Sumatera Thawalib yang lebih mengutamakan ilmu-ilmu untuk menggali dan memahami Islam dari sumbernya. Menyadari gencarnya kegiatan kaum muda, kaum tua pun mulai bergerak, mereka melakukan reaksi yang sama, yaitu dengan menerbitkan majalah. Di antara majalah yang mereka terbitkan termasuk *Suluh Melaju di Padang* (1913), *al-Mizan di Maninjau* (1918) yang diterbitkan oleh organisasi local *Sjarikat al-Ihsan*, *Al-Mizan*, (lain pula) 1928 dan *Suarti* (*Suara Perti*) dalam tahun 1940 yang berkenaan dengan soal-soal organisasi. Dalam bidang pendidikan, kaum tua mengaktifkan lembaga surau. Kaum tua juga membentuk suatu perkumpulan yang bernama *Ittihadul* sebagai tandingan kaum muda yang dikenal dengan PGAI ([www.Persatuan Tarbiyah Islamiyah.com](http://www.Persatuan Tarbiyah Islamiyah.com), diakses pada tanggal 9 Agustus 2018).

Diilhami oleh perkembangan tersebut, timbullah niat Syekh Sulaiman ar-Rasuly untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua dalam sebuah wadah. Untuk itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuly, memprakarsai suatu pertemuan besar di Candung Bukittinggi pada tanggal 5 Mei 1928. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah kaum tua, diantaranya Syekh Abbas al-Qadhi, Syekh Muhammad Djamil Djaho, Syekh Wahid ash-Shahily dan ulama kaum tua lainnya. Dalam pertemuan itu disepakati untuk mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan MTI ([www.Persatuan Tarbiyah Islamiyah.com](http://www.Persatuan Tarbiyah Islamiyah.com), diakses pada tanggal 9 Agustus 2018).

Pada tahun 1930, mengingat pertumbuhan dan perkembangan madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah, timbullah keinginan Syekh Sulaiman Ar-Rasuly untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua, terutama para pengelola madrasah dalam suatu wadah organisasi. Untuk itu, ia mengumpulkan kembali ulama-ulama kaum tua di Candung Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 1930. Pertemuan ini memutuskan untuk membentuk organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan PTI. Ketika terbentuknya organisasi ini ada 7 Madrasah Tarbiyah Islamiyah kepunyaan kaum Tua yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1930 PTI mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sebagai badan hukum, yang oleh karena itu tahun 1930 disebut juga sebagai tahun pertama bagi PTI. Jumlah ulama yang menggabungkan diri dengan PTI cukup banyak ([www.Persatuan Tarbiyah Islamiyah.com](http://www.PersatuanTarbiyahIslamiyah.com), diakses pada tanggal 9 Agustus 2018).

Pada tahun 1935 diadakan rapat lengkap di Candung Bukittinggi yang menunjuk H. Siradjudin Abbas sebagai ketua Pengurus Besar PTI. Pada masa kepengurusan ini, berhasil disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh konferensi tanggal 11-16 Februari 1938 di Bukittinggi, dan disepakati juga singkatan Persatuan Tarbiyah Islamiyah berubah menjadi PERTI. Ketika itu dirumuskan pula tujuan organisasi ini, yaitu :

- a. Berusaha memajukan pendidikan agama dan yang bersangkutan dengan itu.
- b. Menyiarkan dan mempertahankan agama Islam dari segala serangan.
- c. Memperhatikan kepentingan ulama-ulama, guru-guru sekolah agama seluruhnya, terutama sekolah-sekolah Tarbiyah Islamiyah.
- d. Memperkukuh silaturahmi sesama anggota.
- e. Memperkukuh dan mempekuat adat nan kawi, syara' nan lazim dalam setiap negeri.

Isu yang mengatakan PERTI hanyalah organisasi lokal dan partai kecil, kelihatannya membuat para peneliti kurang tertarik menjadikan objek studi. Padahal menurut Deliar Noer, pada tahun 1945 saja organisasi ini sudah mempunyai cabang hampir diseluruh Sumatera dan beberapa daerah lainnya di luar pulau Sumatera, seperti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan dengan anggota sekitar 400.000 orang. Perkembangan selanjutnya tercatat 350 buah madrasah milik PERTI dari tingkat kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Oleh karena itu perlu dipertegas lagi, tidak mustahil organisasi kaum tua yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Ahlussunnah Waljama'ah dan mazhab Syafi'i ini, mempunyai banyak studi yang menarik untuk dikaji ([www.Persatuan Tarbiyah Islamiyah.com](http://www.Persatuan Tarbiyah Islamiyah.com), diakses pada tanggal 9 Agustus 2018).

Walaupun Tarbiyah menyatakan independen dan tidak lagi terlibat dalam politik praktis, tetapi kondisi ini tidak ditunjukkan oleh elite-elite Tarbiyah yang masih terlibat dalam partai politik. Elite-elite Tarbiyah pada pasca Orde Baru masih mendapat fasilitas untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Mereka yang terlibat dalam partai politik secara tidak langsung telah menarik masa Tarbiyah untuk menyalurkan aspirasi politik mereka ke Partai Golkar. Di sisi lain elite-elite yang berada di luar partai politik (elite non partisan) seperti akademisi dan birokrat juga memiliki kepentingan untuk menjaga eksistensi organisasi ini agar jauh dari kepentingan-kepentingan politik ([www.Persatuan Tarbiyah Islamiyah.com](http://www.Persatuan Tarbiyah Islamiyah.com), diakses pada tanggal 9 Agustus 2018).

Dengan posisi yang semacam ini, orang akan jadi paham akan apa yang terjadi di kalangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah setelah berkiprah di dunia politik. Garapannya yang bercabang dua pendidikan keagamaan dan politik kenegaraan, adalah lahan yang jelas menuntut dinamisasi dan penalaran intelektual dengan segala macam sistemnya. Artinya, para tokoh Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang memiliki kemampuan intelektual, punya

dua wajah fundamental garapan penalarannya. Hanya, karena telah mengambil kata sepakat untuk tidak membicarakan nilai-nilai keagamaan, ibadah dan akidah yang sudah menjadi amalan banyak orang, mereka menjadi segan untuk menggarap lahan itu. Lalu, sebagai manusia, dan apalagi sebagai tokoh-tokoh yang berpotensi intelektual dan butuh penyalurannya, disengaja atau tidak, potensi nalar itu teralihkan ke potensi kedua, dunia politik dengan segala macam tipu daya (www.Persatuan Tarbiyah Islamiyah.com, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018).

Namun keterlibatan elite-elite Tarbiyah dalam politik, tidak begitu saja mudah diterima oleh elite-elite Tarbiyah lainnya yang berasal dari akademisi. Mereka memandang beragam persoalan keterlibatan elite-elite Tarbiyah di kancah politik lokal di Kota Padang. Pandangan pertama adalah keterlibatan elite-elite Tarbiyah di kancah politik tidak membawa dampak apa-apa terhadap Tarbiyah secara kelembagaan. Mereka yang masuk partai politik hanya membawa misi pribadi tanpa mencoba memberikan sumbangan fikiran dan materi untuk perkembangan lembaga kedepan. Kondisi tersebut hanya menyeret Tarbiyah dalam pergolakan politik semata, sehingga inti dari misi lembaga yaitu pendidikan, sosial dan dakwah sering terabaikan (www.Persatuan Tarbiyah Islamiyah.com, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018).

### **3.1.2 Sejarah Berdirinya NU**

Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama' pada tanggal 31 Januari 1926/ 26 Rajab 1344 H di Surabaya. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924, Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliah keagamaan ala kaum Sunni, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanah Arab, dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengamalan

agama dengan dengan system bermadzhab, tawasul, ziarah kubur, Maulid Nabi dan lain sebagainya, akan segera dilarang (Ridwan, 2004: 95).

Tidak hanya itu, Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan pengaruh kekuasaannya ke seluruh dunia Islam. Dengan dalih demi kejayaan Islam, ia berencana meneruskan kekhilafan Islam yang terputus di Turki pasca runtuhnya daulah Utsmaniyyah. Untuk itu dia berencana menggelar Mukhtar Khilafah di Kota Suci Makkah, sebagai penerua Khilafah yang terputus itu. Seluruh negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri mukhtar tersebut, termasuk Indonesia. Awalnya, utusan yang direkomendasikan adalah HOS Cokroaminoto (SI), KH. Mas Mansur (Muhammadiyah) dan KH. Abdul Wahab Chasbullah (pesantren). Namun, rupanya ada permainan licik diantara kelompok yang mengusung para calon utusan Indonesia. Dengan alasan Kiai Wahab tidak mewakili organisasi resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan (Ridwan, 2004: 96).

Peristiwa itu menyadarkan para ulama' pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus menyisahkan sakit hati yang mendalam, karena tidak ada lagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana Raja Ibnu Saud yang akan mengubah model beragama di Makkah. Para ulama' pesantren sangat tidak bisa menerima kebijakan raja yang anti kebebasan bermadzhab, anti ma'ulid Nabi, anti ziarah makam dan lain sebagainya. Bahkan santer terdengar berita makam Nabi Muhammad SAW pun berencana digusur. Bagi para kyai pesantren, pembaruan adalah suatu keharusan. KH. Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan bisa menerima gagasan para kaum modernis untuk menghimbau umat Islam kembali pada ajaran Islam murni. Namun Kyai Hasyim tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta umat Islam melepaskan diri dari system bermadzhab. Disamping itu, karena ide pembaruan dilakukan dengan cara melecehkan, merendahkan dan membodoh-bodohkan, maka para ulama pesantren menolaknya (Ridwan, 2004: 97).



Seperti NU di tingkat nasional tujuan berdirinya NU di Sumbar khususnya Kota Padang adalah untuk menegakkan ajaran Islam menurut faham Ahlulsunah wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat Sumatera Utara, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk tercapainya tujuan tersebut, NU berusaha memainkan berbagai peran di bidang agama, sosial-budaya dan ekonomi. Lebih rinci, NU memberikan perhatian pada dakwah dan pengembangan ajaran, peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan sosial masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan kemampuan pertanian masyarakat, pengembangan mutu dan peran pesantren, peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, pengembangan masjid dan perannya, pengembangan tenaga kerja, kritik dan pengembangan hukum dan HAM, membentuk pemuda yang tangguh secara fisik dan pengembangan seni baca al-Qur'an (Buya H. Tuanku Bagindo M. Letter, wawancara pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018).

Untuk itu, NU melaksanakan aktivitas-aktivitas keagamaan yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam berfaham Ahlulsunah wal Jama'ah. Sesuai dengan program pokoknya, dalam AD/ART NU, fungsi pelaksana kebijakan NU di bidang keagamaan dipegang oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBMNU), Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU), Jam'iyah Ahli Tariqah al-Mu'tabarah dan Jam'iyatul Qurra wal Huffazh (JQH). Di lingkungan NU wilayah Sumatera Barat, hanya satu dari lima lembaga dan badan otonom di atas yang telah terbentuk hingga akhir tahun 2010, yakni Lembaga Dakwah NU. Sedangkan sisanya baru terbentuk dan disahkan kepengurusannya pada tanggal 2 Maret 2011. Dengan demikian hampir seluruh aktivitas keagamaan NU hanya dilaksanakan oleh LDNU ((Buya H. Tuanku Bagindo M. Letter, wawancara pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018).

Nahdlatul Ulama memang dilahirkan sebagai partai politik, namun merupakan kekuatan (potensi) politik yang sangat besar karena anggotanya

puluhan juta jumlahnya. Oleh karena itu, semua partai politik selalu ingin mempengaruhi pimpinan NU supaya mendapat kekuatan politiknya. Dalam keadaan seperti ini NU dapat memainkan politiknya untuk mempengaruhi partai-partai politik. NU bermain politik pada tingkat tinggi tidak hanya sekedar mencari kursi-kursi politik tetapi bagaimana para politisinya dapat dikerahkan dan diarahkan sesuai dengan garis politik yang diinginkan oleh NU. Partai yang dimainkan NU adalah politik kebangsaan dalam arti untuk kepentingan seluruh bangsa tidak hanya untuk kepentingan partai atau kelompok. Sebagai jam'iyah yang bukan partai politik tetapi merupakan kekuatan politik yang besar adakalanya NU mengalami kesulitan di dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam sejarahnya yang cukup panjang NU mempunyai pengalaman tentang cara-caramenyalurkan aspriasi politiknya (Ridwan, 2004: 98).

